BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menghadapi kehidupan ekonomi Indonesia, koperasi adalah salah satu pilar ekonomi nasional yang diharapkan bisa berkembang sebagai badan usaha yang sehat, kuat dan mandiri. Dengan berkembangnya kegiatan usaha pada koperasi, tuntutan pengelolaan dilaksanakan secara profesioal sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi. Dalam hal ini koperasi sebagai salah satu bentuk usaha yang berwatak sosial dan ekonomi, artinya koperasi bukan hanya memperhatikan aspek bisnis dan mencari keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial. Dalam berlangsungnya kegiatan ekonomi, koperasi memberikan pengaruh yang cukup masif serta memberikan kontribusi nyata pada penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan dan sumbangan pada nilai tambah ekonomi (Rima, 2018).

Melalui koperasi, para anggota ikut secara aktif memperbaiki kehidupanya dan kehidupan masyarakat di sekitarnya melalui karya dan jasa yang disumbangkan. Tujuan utama terbentuknya koperasi adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi bagi masyarakat, khususnya bagi para anggota. Dalam usaha meningkatkan taraf ekonomi tersebut maka koperasi berusaha memaksimalkan tingkat usahanya serta memberikan manfaat semaksimal mungkin untuk para anggotanya. Untuk mencapai tujuannya, maka koperasi harus menyusun setiap aspek internal koperasi, terutama dalam penyusunan laporan keuangan.

Salah satu komponen yang mempunyai keterkaitan yang signifikan dengan laporan keuangan adalah akun aset tetap. Dalam kegiatan usaha, aset tetap menjadi sangat penting untuk memastikan kelancaran operasi rutin dan dipakai berulangulang sehingga diperlukan kebijakan dalam mengatur nilai ekonomi aset tetap tersebut untuk jangka waktu yang juga ditetapkan. Pengelolaan aset tetap yang baik dan memiliki ketepatan perhitungan akan memberikan keuntungan dimasa yang akan datang berupa menaikan nilai perusahaan dan dalam jangka pendek dapat meningkatkan laba usaha. Laporan perhitungan sisa hasil usaha atau laporan laba rugi berguna untuk mengetahui kinerja koperasi berupa pendapatan dan beban. Beban yang tinggi disebabkan oleh kegiatan operasional yang tidak efektif dan efisien, menentukan kebijakan metode penyusutan yang terus menerus, berkesinambungan, konsisten dan tetap dapat memberi nilai yang layak saat penyusunan laporan aset tetap yang dimaksud pada laporan keuangan rutin koperasi.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2012: 16) Aset Tetap adalah aset yang dimiliki dan diperjualbelikan (baik dibuat sendiri atau diperoleh dari pembelian, pertukaran, dan sumbangan) yang nilainya relative tinggi dan manfaatnya lebih dari suatu periode akuntansi serta digunakan dalam kegiatan atau operasi perusahaan. Aset tetap memiliki karakteristik berbeda dengan aset yang lainnya, salah satunya yaitu aset yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, digunakan untuk operasi rutin dan tidak dimaksudkan untuk dijual atau diperdagangkan.

Aset tetap yang digunakan dapat menurun kemampuan kerjanya akibat pemakaian dan pemanfaatan dalam operasi rutin usaha. Sehingga koperasi harus menampilkan informasi mengenai nilai aset secara lengkap sesuai faktanya. Informasi mengenai aset tetap dapat diperoleh dalam komponen laporan keuangan Neraca serta rincian informasi aset tetap harus disajikan di komponen Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, analis keuangan, dan pihak-pihak lainnya termasuk anggota koperasi memerlukan CALK untuk memahami dengan lebih baik mengenai aset tetap.

Dalam akuntansi ada beberapa komponen perlakuan terhadap aset tetap. Menurut PSAK No.16 Revisi 2016 mengatur tentang perlakuan aset tetap antara lain pengakuan, biaya perolehan, pengukuran biaya perolehan, penyusutan dan penghentian aset tetap, sehingga laporan keuangan menunjukkan nilai yang wajar, benar dan terpercaya.

Dalam memperoleh aset tetap koperasi dapat menempuh dengan cara yaitu pembelian tunai, pembelian angsuran, tukar dengan aset tetap lainya, ditukar dengan surat-surat berharga, diperoleh sebaga donasi. Dan masing-masing cara perolehan aset tetap itu mempengaruhi penentuan harga perolehan. Harga perolehaan aset tetap merupakan seluruh pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap tersebut sehingga siap digunakan dalam operasi normal koperasi.

Lebih lanjut menurut Hery (2017:180) menyatakan kapasitas aset tetap untuk bekerja optimum akan mengalami penurunan seiring perjalanan waktu. Kemudian

dampak menurunnya kapasitas ini nilai aset tetap akan berkurang, keadaan inilah yang mengharuskan adanya penyusutan kepada semua aset tetap perusahaan.

Menurut Pesak, dkk (2018:456-457) menyatakan bahwa penyusutan merupakan penganggaran beban tetap setiap periode akuntansi, secara terukur dan terus menerus dari harga perolehan selama masa manfaat aset tersebut. Dalam menetapkan besarnya beban penyusutan suatu aset tetap, ada beberapa metode yang sering digunakan dalam suatu koperasi, yaitu metode garis lurus, metode jam jasa, metode hasil produksi, metode beban menurun, penggunaan metode ini tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri.

Saat aset tetap digunakan sudah pasti terjadi beberapa pengeluaranpengeluaran, antara lain disebut *Revenue Expenditures* dan *Capital Expenditures*. *Revenue Expenditures* merupakan pengeluaran yang dijadikan beban pada periode saat pengeluaran dikeluarkan, karena memberi manfaat kepada aset tetap kurang dari satu tahun. Sementara *Capital Expenditures* merupakan pengeluaran yang harus menambah nilai harga perolehan, karena pengeluaran ini terkait dengan manfaat yang dinikmati lebih dari satu periode akuntansi (Sisyandi, 2013).

Aset tetap dapat dapat dihentikan pemakaianya dalam operasi koperasi dan dikeluarkanya aset tetap dari pembukuan koperasi disebabkan aset tersebut tidak dapat dipergunakan lagi atau rusak, di jual atau ditukar dengan aset lain.

Koperasi Konsumen Mitra Husada Sejahtera merupakan koperasi yang terletak di Jl. Raya Soreang Cipatik No.95, Pamekaran, Soreang Kabupaten bandung. Koperasi ini awalnya bernama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (KPRI Dinkes Kabupaten Bandung) dengan

badan hukum No. 9519/BH/PAD/518-Kop/VIII/2007. Kemudian pada tahun 2021 koperasi berganti nama menjadi Koperasi Konsumen Mintra Husada Sejahtera, dimana koperasi ini beranggotakan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, petugas Puskesmas se-Kabupaten Bandung, pegawai RSUD Soreang, Majalaya dan Cicalengka.

Koperasi Konsumen Mitra Husada Sejahtera memiliki 3 (tiga) unit usaha yaitu unit usaha simpan pinjam (USP), unit usaha waserda dan Photocopy serta pengadaan barang dan ATK. Dari ketiga unit usaha tersebut koperasi berhasil memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah pajak sebesar Rp 670.247.051 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 654.097.484 atau terjadi peningkatan sebesar 2%. Salah satu aspek yang mendorong peningkatan tersebut tidak lepas dari ketersediaan aset tetap koperasi. Dengan tersedianya dan maksimalnya penggunaan Aset tetap yang dimiliki koperasi dapat menunjang kegiatan usaha koperasi, yaitu dapat melancarkan proses transaksi, dapat memberikan fasilitas yang baik dalam usaha koperasi (penggunaan gedung untuk unit usada waserda), bahkan dapat memberikan tambahan pendapatan melalui kegiatan sewa barang atau gedung serta mesin fotocpy dengan memberikan layanan fotocopy. Berikut adalah rincian aset tetap dari Koperasi Konsumen Mitra Husada Sejahtera Periode 2020-2023:

Tabel 1. 1 Aset Tetap Koperasi Konsumen Mitra Husada Sejahtera Periode 2020 – 2023

Keterangan	Daftar Aset Tetap Periode 31 Desember (Dalam Rupiah)					
	2020	2021	2022	2023		
Tanah	-	1.307.000.000	1.337.000.000	1.337.000.000		
Bangunan	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000		
Peralatan Kantor	215.935.150	158.316.000	203.382.000	212.062.000		
Total Nilai						
Perolehan Aset	215.935.150	1.965.316.000	2.040.382.000	1.953.045.090		
Tetap						

Keterangan	Daftar Aset Tetap Periode 31 Desember (Dalam Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	
Akm. Penyusutan	(110.489.150)	(25.514.910)	(60.770.910)	(96.016.910)	
Nilai Buku Aset Tetap	105.446.000	1.939.801.090	1.979.611.090	1.953.045.090	

Sumber : Neraca Koperasi Konsumen Mitra Husada Sejahtera dan Laporan Keuangan Periode 2020-2023

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas diketahui bahwa total aset tetap koperasi mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021, hal tersebut dikarenakan adanya penambahan aset tetap berupa tanah dan bangunan pada koperasi. Sedangkan aset tetap peralatan kantor memiliki jumlah yang relatif sama selama empat tahun terakhir, untuk lengkapnya tercantum dalam Lampiran 4.

Koperasi Konsumen Mitra Husada Sejahtera menerapkan metode garis lurus untuk perhitungan penyusutan aset tetapnya. Metode garis lurus menghasilkan biaya penyusutan yang tetap selama masa manfaat aset tetap tersebut. Berikut adalah perbandingan penyusutan Koperasi Konsumen Mitra Husada Sejahtera Periode 2022 dan 2023 menggunakan perhitungan penyusutan metode garis lurus:

Tabel 1. 2 Rincian Penyusutan Aset Tetap Koperasi Konsumen Mitra Husada Sejahtera Periode 2022 - 2023

Votovongon	Thn. Prlhn	Masa Nilai Pnystn Perolehan		Beban Penyusutan Aset Tetap		Nilai Buku 2023
Keterangan		Aset Tetap		2022	2023	
Tanah	2021	-	1.200.000.000	1	-	1.200.000.000
Bangunan	2021	20	500.000.000	15.000.000	15.000.000	470.000.000
Partisi gedung	2018	10	78.816.000	3.940.800	4.790.800	58.073.600
Perbaikan Gdng	2020	8	36.425.000	6.726.270	6.726.270	14.296.100
AC Split	2021	8	30.115.000	2.176.930	2.176.930	24.255.390
Komputer Lenovo	2021	5	7.200.000	360.000	360.000	6.120.000
Printer EPSON	2021	5	2.040.000	852.000	852.000	234.000
Monitor Dell	2021	5	600.000	-	•	-
Pagar Depan Knt	2022	10	22.000.000	2.200.000	2.200.000	17.600.000
Printer EPSON	2022	5	3.500.000	700.000	700.000	2.100.000
Cash Register	2022	8	2.200.000	440.000	440.000	1.320.000
Folding Gate	2023	8	17.366.000	2.000.000	2.000.000	13.366.000

Sumber : Rincian Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Koperasi Konsumen Mitra Husada Sejahtera Periode 2023 Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui bahwa terdapat aset tetap partisi gedung yang memiliki beban penyusutan yang berbeda untuk tahun 2022 dengan tahun 2023, padahal koperasi menggunakan metode penyusutan garis lurus yang secara teori selalu menghasilkan biaya penyusutan yang tetap selama masa manfaat. (Doe, 2019) dalam *International Journal of Financial Studies* (2019) menekankan bahwa metode garis lurus menghasilkan biaya penyusutan yang konstan setiap tahun.

Dan berdasarkan tabel tersebut juga diketahui bahwa nilai buku dari beberapa aset tetap koperasi sudah habis seperti monitor dell. Monitor Dell dibeli pada tahun 2021 dengan nilai perolehan Rp600.000 dan ditetapkan masa manfaat selama 5 (lima) tahun. Dengan menggunakan metode garis lurus, nominal penyusutan untuk setiap tahun akan memiliki nilai yang sama. Monitor Dell dibeli pada tahun 2021 dan pada tahun 2024 nilai bukunya sudah habis, padahal masih tersisa 2 tahun lagi jika melihat dari masa manfaat yang ditetapkan oleh koperasi untuk aset tetap tersebut.

Kasus seperti itu juga terjadi pada aset tetap lainnya, seperti aset tetap perbaikan gedung aset tetap perbaikan gedung untuk perbaikan dinding gedung karena terjadi keretakan dan mengecat ulang atau memperbaiki plesteran yang terkelupas. Nilai perolehan sebesar Rp 36.425.000 dan masa manfaat delapan tahun, aset tetap tersebut akan habis nilai bukunya terlebih dahulu sebelum habis masa manfaatnya. Artinya, koperasi tidak memperhatikan dalam menentukan masa manfaat dari setiap aset tetap. Masa manfaat ini tentunya akan berdampak pada besaran beban penyusutan koperasi yang juga dapat mempengaruhi laba/rugi koperasi dan dapat mengurangi pajak koperasi. Hal ini tentunya membuat laporan

keuangan koperasi tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, pembebanan penyusutan harus dipertimbangkan secara layak dan wajar, termasuk dalam menentukan masa manfaat penyusutan suatu aset tetap.

Sehingga ditemukan beberapa aset tetap yang sudah habis nilai bukunya namun masih layak, masih memberikan manfaat ekonomi dan masih digunakan untuk kegiatan operasional koperasi. Artinya manfaat aset pada buku lebih cepat habis daripada faktanya di lapangan, aset tetap tersebut salah satunya berupa kendaraan roda dua yaitu motor yang dimiliki Koperasi Konsumen Mitra Husada Sejahtera, nilai buku untuk aset kendaraan motor sudah habis di tahun 2021, namun kendaraan tersebut masih digunakan untuk kegiatan operasional koperasi. Atas kondisi tersebut koperasi tidak memperhatikan penentuan masa manfaat aset tetap. Kesalahan dalam penyajian dan penyusutan aset tetap dapat mengakibatkan informasi yang dihasilkan pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Suryadi & Putri, 2019) pada PT. Suryakabel belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP No. 15 yakni dalam hal pengukuran PT. Suryakabel tidak melakukan perhitungan atas penghentian aset sedangkan dalam hal pengungkapan PT. Suryakabel Cemerlang juga tidak membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). (Ariyanti & Murniati, 2019) dalam penelitian perlakuan akuntansi Aset Tetap pada Koperasi PT. Pisma Putra Textile menyimpulkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian dengan SAK ETAP pada Laporan Keuangannya.

(Sahara & Wahyuningsih, 2017) menyatakan bahwa perhitungan dan pencatatan yang tidak sesuai Standar Akuntansi Keuangan akan berpengaruh pada laporan keuangan terutama pada neraca, laporan rugi laba dan perubahan ekuitas. Pada neraca penghentian Aset Tetap akan mempengaruhi nilai Aset Tetap, pada laba rugi akan mempengaruhi nilai beban pada periode berjalan dan pada laporan perubahan modal akan mempengaruhi jumlah laba yang berasal dari laporan laba rugi. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil keuangan yang tepat dan akurat, perlu dilakukan pembenahan perhitungan dan pencatatan Aset Tetap sesuai SAK ETAP tentang Aset Tetap.

Selain penggunaan SAK ETAP sebagai pembenahan perhitungan terhadap aset tetap koperasi, pada tahun 2024 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil Menengah Republik Indonesia (Permenkop dan UKM RI) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi. Peraturan ini dikeluarkan atas pertimbangan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan koperasi, peraturan ini sekaligus akan memperkuat legitimasi penggunaan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitka oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di dalam ekosistem bisnis. Dalam Permenkop tersebut juga disebutkan mengenai perlakuan aset tetap koperasi, sehingga menambah penguatan terhadap akuntabilitas aset tetap koperasi.

Mengingat akan pentingnya kelengkapan pengungkapan standar akuntansi sebagai pedoman sebuah entitas dalam pengambilan keputusan sehingga tidak menimbulkan salah tafsir bagi para pengguna laporan keuangan dan berdasarkan

dengan data dan fenomena yang telah dikumpulkan maka penelitian ini akan diberi judul "Analisis Perlakuan Aset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pada Koperasi Konsumen Mitra Husada Sejahtera)".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan fenomena dari latar belakang maka penelitian ini dilakukan sebagai bentuk untuk menjawab beberapa permasalahan yang dirangkum dalam identifikasi masalah sebagai berikut:

- Bagaimana kesesuaian pengakuan aset tetap pada Koperasi Konsumen Mitra Husada Sejahtera berdasarkan SAK ETAP serta penyusunannya di Laporan Keuangan.
- Bagaimana kesesuaian pengukuran Aset Tetap pada Koperasi Konsumen Mitra Husada Sejahtera berdasarkan SAK ETAP serta penyusunannya di Laporan Keuangan.
- Bagaimana kesesuaian penyajian Aset Tetap pada Koperasi Konsumen Mitra Husada Sejahtera berdasarkan SAK ETAP serta penyusunannya di Laporan Keuangan.
- Bagaimana kesesuaian pengungkapan Aset Tetap pada Koperasi Konsumen
 Mitra Husada Sejahtera berdasarkan SAK ETAP serta penyusunannya di Laporan Keuangan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dan menggambarkan bagaimana kesesuaian baik dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Aset Tetap pada Koperasi Konsumen Mitra Husada Sejahtera dengan standar akuntansi yang relevan yakni SAK ETAP tentang Aset tetap.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi berupa :

- Kesesuian pengakuan aset tetap pada Koperasi Konsumen Mitra Husada Sejahtera berdasarkan SAK ETAP serta penyusunannya di Laporan Keuangan.
- Kesesuaian pengukuran Aset Tetap pada Koperasi Konsumen Mitra Husada Sejahtera berdasarkan SAK ETAP serta penyusunannya di Laporan Keuangan.
- Kesesuaian penyajian Aset Tetap pada Koperasi Konsumen Mitra Husada Sejahtera berdasarkan SAK ETAP serta penyusunannya di Laporan Keuangan.
- Kesesuaian pengungkapan Aset Tetap pada Koperasi Konsumen Mitra Husada Sejahtera berdasarkan SAK ETAP serta penyusunannya di Laporan Keuangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan agar dapat bermanfaat baik dari aspek teoritis maupun praktis, maka dari itu kegunaannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna dalam menambah pemahaman penulis sesuai dengan topik dan sebagai salah satu untuk memotivasi penulis menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama menempuh studi.

2. Bagi pengembangan bidang keilmuan

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi, rujukan, bahan bacaan atau referensi tambahan dengan topik yang relevan terkait analisis pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Aset Tetap berdasarkan SAK ETAP sehingga dapat dikembangkan lebih baik lagi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Koperasi

Sebagai bahan rekomendasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan penyajian laporan keuangan yang dibuat sesuai SAK ETAP maupun Permenkop dan UKM RI sehingga koperasi dapat membuat pengambilan keputusan yang andal.

2. Bagi anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan memberikan rekomendasi dalam menilai manfaat ekonomi, memahami kondisi keuangan koperasi dan memastikan bahwa koperasi beroperasi dengan transparansi, akuntabilitas dan keberlanjutan yang baik.

Diharapkan pula dapat berguna dalam pengambilan keputusan yang lebih bijaksana khususnya mengenai pengelolaan Aset Tetap.

3. Bagi Pengurus, Pengawas dan Karyawan:

Sebagai bahan rekomendasi dan rujukan bagi pengurus, pengawas dan karyawan sehingga dapat memperbaiki untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku lebih baik lagi. Selain itu, diharapkan jika penyusunan laporan keuangan sudah memenuhi standar tidak terjadi bias dan kesalahan atau kelalaian dapat di minimalisir sehingga pengambilan keputusan dapat lebih andal.